

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipasif dan akuntabel merupakan isu aktual yang perlu mendapat respon dini Pemerintah Kabupaten. Tuntutan ini bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dipicu oleh meningkatnya pendidikan masyarakat, serta semakin mandirinya media masa yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menembus sekat-sekat kekuasaan.

Dalam rangka meningkatkan akses informasi, cakupan dan kualitas pelayanan publik, masyarakat menuntut visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati yang terlebih dahulu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kongkrit dan aplikatif dari pemerintah sebagai acuan penilaian kinerja. Selanjutnya pada setiap awal tahun anggaran, pemerintah juga dituntut untuk menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perencanaan Kinerja untuk SKPD yang kemudian pada akhir tahun diharuskan mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kerjanya. Untuk merespon tuntutan masyarakat dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya diwajibkan menyiapkan semua dokumen yang berkaitan akuntabilitas kinerja. LAKIP ini merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban Akuntabilitas kinerja mulai dari visi sampai dengan capaian target kinerja kegiatan.

Visi Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Kebijakan Anggaran Daerah dan Memberi Masukan Kepada Pimpinan Daerah, sebagaimana yang dijabarkan dalam misi :

1. Meningkatkan pengawasan kebijakan anggaran, evaluasi dan peraturan daerah/Qanun untuk mengendalikan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia auditor dan penguatan kelembagaan pengawasan ;
3. Mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang pro rakyat, tertib, patuh dan patuh kepada peraturan yang berlaku dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
4. Mewujudkan pemeriksaan yang standar dan memberi masukan kepada pimpinan daerah;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan.

Penjabaran/ implementasi dari misi tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan lima tahunan. Sesuai dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja untuk Tahun 2016 telah ditetapkan 8 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja sasaran. Dari 13 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dengan rincian, 3 (tiga) indikator bernilai cukup Baik (50 -79) dan 10 (sepuluh) indikator kinerja bernilai baik (80-100).

Dalam melakukan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 dihadapkan pada kendala dan keterbatasan sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya instrumen pengumpulan data kinerja yang standar.
- b. Keterbatasan kemampuan perangkat daerah dalam merumuskan indikator kinerja yang benar-benar terukur.

Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LAKIP Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kerjanya, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai media informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan umpan balik peningkatan kinerja dimasa mendatang menuju pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Calang, Januari 2016
INSPEKTUR INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH JAYA

H.T. RIDWAN, SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19560807 198103 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan, namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud dari sebuah pertanggungjawaban.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.

Calang, Januari 2016
**INSPEKTUR INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH JAYA**

H.T. RIDWAN, SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19560807 198103 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	2
C. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi.....	9
B. Misi.....	9
C. Tujuan.....	9
D. Sasaran.....	10
E. Indikator Kinerja Utama.....	11
F. Rencana Kinerja Tahun 2015.....	12
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2015.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2015.....	15
B. Aspek Keuangan.....	28
BAB IV PENUTUP	29

..

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015
Lampiran 3	Realisasi Pemeriksaan Berkala Tahun 2015
Lampiran 4	Rekapitulasi Penyampaian LP2P Tahun 2015





A. Latar Belakang

Penilaian kinerja organisasi publik atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam proses demokratisasi di era reformasi ini. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja (terlampir) sebagai Acuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Hambatan lain terjadi karena konsep akuntabilitas dan kinerja itu sendiri adalah merupakan konsep yang besar dan multi dimensi. Sebagian pakar berpendapat bahwa akuntabilitas adalah merupakan bagian dari indikator kinerja. Akan tetapi sebagian pakar yang lain justru menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bukan merupakan indikator kinerja, akan tetapi konsep lain yang sejajar dengan kinerja. Dalam peraturan diatas, pendekatan akuntabilitas dan kinerja lebih kepada pendekatan yang pertama (akuntabilitas adalah merupakan salah satu indikator kinerja).

Konsep kinerja publik muncul untuk menciptakan *good governance* dalam mengelola urusan-urusan publik. Sehingga dalam menciptakan kinerja publik perlu adanya management strategy yang artinya bahwa visi dan misi tidak akan berarti tanpa adanya aktualisasi kinerja dalam organisasi pemerintahan beserta indikatornya dalam kerangka menciptakan *good governance*.

Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi pemerintah kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras, serasi, dan seimbang. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang telah berhasil dicapai pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh tersebut dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Faktor penentu keberhasilan diawali dengan melakukan kajian strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Aceh Jaya. Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan selama ini, berimplikasi pada masa depan. Jika permasalahan dasar itu belum dapat diatasi sehingga

mengakibatkan keberlanjutan secara terus menerus konsekuensinya akan terjadi proses komplikasi dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Permasalahan

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Namun pada perkembangannya tentu muncul pula permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Inspektorat merupakan lembaga pengawasan dan pembinaan yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektoral diharapkan dapat mengakomodasikan kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan Gampong sesuai dengan Qanun Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2014.

Keadaan Personil Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya berjumlah 31 orang pegawai yang terdiri dari 9 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 13 orang sebagai staf, dan 6 orang tenaga kontrak daerah. Jumlah tersebut menggambarkan jumlah yang masih sangat sedikit dibandingkan dengan beban kerja yang membutuhkan ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian pula dalam hal penempatan pegawai belum sesuai dengan bidang keahliannya. Ketersediaan peralatan pendukung juga masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat kinerja sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi yang terkait pengawasan

Keterbatasan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah mengikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional seperti Diklat Pim Tingkat IV, III serta Diklat Fungsional seperti Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim serta diklat-diklat lainnya seperti

diklat dan bimtek penyusunan Peraturan Perundang-undangan, , Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bimtek Reviu LKPD berbasis akrual, Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual dan lain-lain.

2. Peningkatan objek pemeriksaan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 26 ayat (4) disebutkan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :

- Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
- Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan Aparat Pengawas Interen Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, Kecamatan dan pemerintahan Desa/Gampong.

Seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan, tugas Inspektorat semakin meluas seperti yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah tahun 2015, dimana tugas Inspektorat Kabupaten/ Kota melaksanakan Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah .

3. Peningkatan kinerja pengawasan daerah (sarana dan prasarana, penyelesaian tindak lanjut)

Isu pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap objek pemeriksaan (Objek), oleh karena luas wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang mencapai 3.727 km² yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 172 Desa, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 2 kendaraan dinas roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 (4 unit tidak layak pakai) yang digunakan sebagai sarana

mobilitas untuk melakukan pengawasan di 9 kecamatan dan 172 Gampong se Kabupaten Aceh Jaya. Kondisi ini sangat tidak ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan oleh 4 Inspektur Pembantu dan Sekretaris Inspektorat. Namun demikian pemeliharaan kendaraan dinas yang ideal juga dapat memacu pencapaian pengawasan yang professional.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik(good governance) dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017.

Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, yaitu :

a. Perencanaan Kinerja.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan acuan Inspektorat dalam melakukan pengawasan secara sistematis dimana didalam PKPT tersebut dijelaskan lingkup pengawasan unit/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dilaksanakan dalam 1 tahun sekali dan dikoordinasikan dengan aparat pengawasan fungsional lainnya seperti Inspektorat Provinsi Aceh, Inspektorat Jenderal Depdagri, BPKP dan BPK-RI.

b. Sasaran Kinerja.

Sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan PKPT meliputi Sekretariat Daerah Kabupaten yang terdiri dari 9 Bagian, 1 Sekretariat DPRK, 3 Badan, 12 Dinas, 4 kantor , 18 Sekretariat, 1 RSUD,1 BLUD , 10 UPTD bidang Kesehatan, 78 TK, 99 SD, 32 SMP (3 Swasta, 29 Negeri), 8 SMA, 4 SMK, 172 Gampong.

4. Isu Penyelenggaraan Pemerintahan yang Optimal dan Bermanfaat.

Isu penyelenggaraan Pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya isu pengawasan yang profesional dan isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Isu ini juga berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan berkala (berdasarkan PKPT) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap 457 objek pemeriksaan (Obrik) di Kabupaten Aceh Jaya, ditambah dengan pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan khusus dan kasus.

Produk yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), yang berisikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Obrik dilihat dari aspek pengelolaan keuangan, aspek sumber daya manusia serta aspek sarana prasarana yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya gambaran dari pelaksanaan tupoksi tersebut sudah berjalan dengan baik namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bermanfaat yaitu adanya faktor Internal dan faktor eksternal.

a. Kekuatan (Strength)

Faktor Internal merupakan kekuatan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, yaitu :

1. Ketersediaan anggaran pengawasan
2. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan
3. Jabatan fungsional auditor sudah ada
4. SOP pengawasan

b. Kelemahan (Weakness) ;

Faktor Internal yang merupakan kelemahan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya adalah ;

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas APIP
2. Sarana dan prasarana penunjang pengawasan belum memadai
3. Sruktur organisasi belum sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007
4. Tumpang tindih antara tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional
5. Penyelesaian LHP tidak tepat waktu

c. Peluang (Opportunity)

Faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang bagi Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya adalah :

1. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Dukungan masyarakat tinggi untuk memberantas KKN. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dan pembangunan
3. Koordinasi dengan instansi terkait baik.
4. Objek Pemeriksaan (Obrik) menyadari pentingnya kegiatan pengawasan.
5. Adanya regulasi terkait bidang pengawasan yang terperinci.

d. Ancaman (Threat)

Faktor-faktor eksternal yang merupakan ancaman bagi Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya adalah :

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Aceh dan Inpektorat Kabupaten Aceh Jaya dari SKPD yang lambat dilakukan.
2. Opini negatif dari Obrik terhadap kegiatan pengawasan.
3. Tuntutan masyarakat yang menghendaki penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam waktu yang cepat.
4. Belum terbentuknya unit pengaduan masyarakat.

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut di atas, kapasitas Inspektorat sebagai lembaga pengawas pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Gampong di Kabupaten Aceh Jaya perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pengawasan secara baik.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Strategi integrasi kebelakang dan pengembangan.

- Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas partisipasi aktif warga dalam turut memikirkan kemajuan Kabupaten Aceh Jaya .
- Selain itu kaitan dengan pengembangan produk adalah dimaksud untuk memperbaiki produk perencanaan yang ada dan atau mengembangkan produk perencanaan yang baru , baik yang akan maupun tanpa dilengkapi dengan kekuatan hukum yang diharapkan dapat dijadikan pedoman/rujukan (road map) bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sendiri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Organisasi lainnya sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki untuk dapat terlihat dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya .

b. Strategi integrasi kedepan

Penetapan strategi integrasi kedepan dimaksud untuk mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai eksekusi negatif sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan suatu rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan.

c. Strategi penguatan kedalam

Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan, menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki manajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

Bab II - Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2013 dan 2014;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran - Lampiran





Rencana Strategis 2013-2017 (Renstra) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagaimana kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai penanggungjawab kegiatan dihadapan DPRD sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis.

a. Visi

"Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Kebijakan Anggaran Daerah dan Memberi Masukan Kepada Pimpinan Daerah"

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, dijabarkan dalam Misi Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya sebagai acuan pelaksanaan aktivitas dan interaksi dalam program-program yang ditetapkan sebagai berikut :

6. Meningkatkan pengawasan kebijakan anggaran, evaluasi dan peraturan daerah/Qanun untuk mengendalikan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia auditor dan penguatan kelembagaan pengawasan ;
8. Mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang pro rakyat, tertib, patuh dan patuh kepada peraturan yang berlaku dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
9. Mewujudkan pemeriksaan yang standar dan memberi masukan kepada pimpinan daerah;
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan .

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya adalah :

1. Meningkatnya ketaatan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan
2. Meningkatnya disiplin dan tertib aparatur Inspektorat
3. Meningkatnya kemampuan Aparatur Pengawas Fungsional sesuai dengan standar audit
4. Meningkatnya kualitas hasil dan sistem pengawasan yang baik
5. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing

6. Penyediaan basic data baik secara tabular maupun spasial yang akurat dalam bentuk analisis data untuk pelaksanaan pengawasan dan dapat diakses dengan cepat
7. Pelaksanaan Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian hasil temuan/ tindak lanjut pada instansi terkait
8. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pembiayaan Inspektorat Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan

d. Sasaran

Adapun Sasaran sebagai bentuk penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Peningkatan peran, fungsi dan kualitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP
2. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang bersih, tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, transparan, bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan serta meningkatkan kualitas pelayanan public dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu, sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan stock holder (pemangku kepentingan) melalui Aparatur Pengawasan fungsional yang memiliki kemampuan standar audit
5. Mengoptimalkan potensi Sumber Daya yang ada dan terjalinnya kemitraan dengan aparat pengawas fungsional lainnya.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan melalui pos pengaduan masyarakat di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.
7. Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Instansi pemerintah Kab. Aceh Jaya dalam rangka memperoleh opini WTP
8. Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan Inspektorat Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;

Didalam mencapai tujuan, rencana strategis memuat misi, visi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk kegiatan rutin

mupun kegiatan pembangunan. Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan strategis merupakan suatu *customer-driven strategic planning* karena didalamnya termuat proses penyusunan yang senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholder* utama. Sehingga dalam penyusunan rencana strategis sangat diperlukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global, terutama dilihat pada perumusan visi, misi, tujuan dan kegiatan organisasi.

Manfaat yang diperoleh bagi SKPD yang melakukan penyusunan renstra yang baik adalah:

1. Dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.
2. Dapat menuntun diagnosa SKPD terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif, dan membangun strateginya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa yang akan datang.
4. Menjamin efektivitas penggunaan sumber daya yang ada.

1. Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan IKU yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi. Pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai hal yang rinci dan mengelola instansi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2012- 2017 yaitu :

1. Presentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat
2. Presentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti
3. Tersedianya pelaporan pengawasan sesuai dengan kebutuhan stake holder

4. Persentase ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat tentang pengawasan Pemerintah

Berdasarkan kebutuhan dan perkembangan kegiatan, maka Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya memperluas Indikator Kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ditetapkan pada awal Tahun 2015. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 memuat target kinerja Tahun 2015 atas seluruh indikator kinerja sasaran. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kerja Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan peran, fungsi dan kualitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP	1.1	Presentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan	90%
2	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan	2.1	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	10 Orang
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang bersih, tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, transparan, bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan serta meningkatkan kualitas pelayanan public dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	3.1	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang di reviu	40 SKPD
4	Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu, sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan stake holder (pemangku kepentingan) melalui Aparatur Pengawasan fungsional yang memiliki kemampuan standar audit	4.1	Presentase Kenaikan Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu	25 %
		4.2	Presentase peningkatan Jumlah obrik pemeriksaan berkala	30 %
		4.3	Jumlah proyek yang dievaluasi	12 Proyek
		4.4	Jumlah laporan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1 Laporan
		4.5	Jumlah LAKIP SKPK yang dievaluasi	24 Lakip
		4.6	Jumlah SKPK yang menjadi peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 SKPD
5	Mengoptimalkan potensi Sumber Daya yang ada dan terjalannya	5.1	Jumlah laporan hasil rapat pemutakhiran data baik tingkat regional maupun nasional	1 Laporan

	kemitraan dengan aparat pengawas fungsional lainnya.			
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan melalui pos pengaduan masyarakat di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.	6.1	Presentase ditindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang pengawasan pemerintahan	80%
7	Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Instansi pemerintah Kab. Aceh Jaya dalam rangka memperoleh opini WTP	7.1	Tersedianya laporan hasil inventarisasi temuan	Ada
		7.2	Presentase Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	30%
8	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan Inspektorat Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	8.1	Terlaksananya kegiatan Majelis TPTGR	Ada

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, berisikan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antar atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. Berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan peran, fungsi dan kualitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP	1.1	Presentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan	90%
2	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan	2.1	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	10 Orang

3	Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang bersih, tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, transparan, bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan serta meningkatkan kualitas pelayanan public dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	3.1	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang di reviu	40 SKPD
4	Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu, sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan stock holder (pemangku kepentingan) melalui Aparatur Pengawasan fungsional yang memiliki kemampuan standar audit	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Presentase Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu Presentase peningkatan Jumlah obrik pemeriksaan berkala Jumlah proyek yang dievaluasi Jumlah laporan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah LAKIP SKPK yang dievaluasi	25% 30% 12 Proyek 1 Laporan 24 Lakip
5	Mengoptimalkan potensi Sumber Daya yang ada dan terjalinnya kemitraan dengan aparat pengawas fungsional lainnya.	5.1	Jumlah laporan hasil rapat pemutakhiran data baik tingkat regional maupun nasional	1 Laporan
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan melalui pos pengaduan masyarakat di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.	6.1	Presentase Tertampungnya pengaduan masyarakat tentang pengawasan pemerintahan	90%
7	Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Instansi pemerintah Kab. Aceh Jaya dalam rangka memperoleh opini WTP	7.1 7.2	Tersedianya laporan hasil inventarisasi temuan Presentase Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Ada 30%
8	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan Inspektorat Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	8.1	Terlaksananya kegiatan Majelis TPTGR	Ada

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	429.429.280.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	211.150.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	50.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	94.500.000
Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp	<u>630.500.000</u>

TOTAL ANGGARAN

Rp 1.415.579.280



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu SKPD dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran SKPD.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi (*performance result*) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat *performance gap* yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang.

Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Namun demikian, sangat disadari bahwa kedua metode tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang relevan dan langsung, objektivitas dan tidak bias, spesifik, cukup, kuantitatif, terinci, praktis dan dapat diyakini. Kondisi inilah yang sepenuhnya belum dapat disajikan dalam LAKIP Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 ini. Sampai saat ini keberhasilan program-program banyak diukur dengan menggunakan indikator *output* dan *outcome*.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran LAKIP Tahun 2015

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	76 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target-target dari sasaran indikator kinerja 2015 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015. Dalam melaksanakan (merealisasikan) RKT 2015 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya telah berhasil memenuhi sebahagian besar program dan kegiatan yang ada pada tahun 2015.

Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015

Adapun capaian kinerja tahun 2015 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	6	7	8
1	Peningkatan peran, fungsi dan kualitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP	1.1	Presentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan	90%	90%	100
2	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan	2.1	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	10 Orang	6	60
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang bersih, tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, transparan, bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan serta meningkatkan kualitas pelayanan public dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	3.1	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang di reviu	40 SKPD	39 SKPD	97.5
4	Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu, sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan stock holder (pemangku kepentingan) melalui	4.1	Presentase jumlah kenaikan PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu	25%	16%	64
		4.2	Presentase peningkatan obrik pemeriksaan berkala	30%	25%	83

	Aparatur Pengawasan fungsional yang memiliki kemampuan standar audit	4.3	Jumlah proyek yang dievaluasi	12 Proyek	6 proyek	50
		4.4	Jumlah laporan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100
		4.5	Jumlah LAKIP SKPK yang dievaluasi	24 LAKIP	26 LAKIP	100
5	Mengoptimalkan potensi Sumber Daya yang ada dan terjalinnya kemitraan dengan aparat pengawas fungsional lainnya.	5.1	Jumlah laporan hasil rapat pemutakhiran data baik tingkat regional maupun nasional	1 Laporan	1 Laporan	100
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan melalui pos pengaduan masyarakat di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.	6.1	Presentase ditindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang pengawasan pemerintahan	80%	80%	100
7	Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Instansi pemerintah Kab. Aceh Jaya dalam rangka memperoleh opini WTP	7.1	Tersedianya laporan hasil inventarisasi temuan	Ada	Ada	100
		7.2	Presentase Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	30%	25%	83
8	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan Inspektorat Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	8.1	Terlaksananya kegiatan Majelis TPTGR	Ada	Ada	100

Apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya memperoleh **Nilai baik**. Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan capaian indikator kinerja yang menggambarkan peran Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 13 (tiga belas) indikator kinerja dari 8 (delapan) sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap indikator yang menyimpang jauh dari targetnya.

Pada tahun 2015 dari 8 sasaran dan 13 indikator kinerja sasaran, hanya 4 indikator kinerja sasaran yang bernilai cukup baik (55%- 75%) dan 9 indikator lainnya bernilai baik (76%-100%).

Berikut uraian indikator kinerja bernilai cukup :

- Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/diklat dengan capaian 60%. Hal ini disebabkan efisiensi anggaran perjalanan dinas bimtek/ diklat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015, disebutkan bahwa uang harian untuk bimtek/diklat di kisaran Rp.110.000,- s/d. Rp 170.000 per harinya. Hal ini mengakibatkan keengganan dari pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek.
- Presentase peningkatan jumlah pegawai yang menyampaikan LP2P tepat waktu dengan capaian 64%. Hal ini disebabkan Wajib LP2P pada Dinas/Badan/Kantor banyak yang tidak menyampaikan LP2P.
- Jumlah proyek yang dievaluasi dengan capaian 50%. Hal ini disebabkan kesalahan dalam memahami target kinerja yang tidak sesuai dengan Renja dan DPA.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan langkah-langkah :

1. Melakukan koordinasi dengan DPKKK agar mengimplementasikan kegiatan sesuai dengan peraturan- peraturan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi yang menyeluruh antara PPTK dan Sekretariat

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2013

Adapun perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			CAPAIAN (%)			Naik/turun/sama	
			Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan peran, fungsi dan kualitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP	1.1	Presentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan	90%	90%	85%	100%	100%	94%	Sama
2	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan	2.1	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	6 orang	10 orang	10 orang	60%	100%	100%	Turun
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang bersih, tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, transparan, bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan serta meningkatkan kualitas pelayanan public dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	3.1	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang di reviu	39 SKPD	39 SKPD	33 SKPD	97.5%	97.5%	97.5%	Sama
4	Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu, sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan stake holder (pemangku kepentingan) melalui Aparatur Pengawasan fungsional yang memiliki kemampuan standar audit	4.1	Presentase kenaikan Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu	16%	62%	52%	64%	85%	52.5%	Turun
		4.2	Presentase peningkatan obrik pemeriksaan berkala	25%	41%	10%	83%	137%	100%	Turun
		4.3	Jumlah proyek yang dievaluasi	6 proyek	12 Proyek	6 proyek	50%	100%	100%	Turun
		4.4	Jumlah laporan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	Sama
		4.5	Jumlah LAKIP SKPK yang dievaluasi	26 LAKIP	24 LAKIP	24 LAKIP	108%	100%	61.5%	Naik
		4.6	Jumlah SKPK yang menjadi peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	32 SKPD	-	-	106%	-	-
5	Mengoptimalkan potensi Sumber Daya yang ada dan terjalinnya kemitraan dengan aparat	5.1	Jumlah laporan hasil rapat pemutakhiran data baik tingkat regional maupun nasional	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	Sama

	pengawas fungsional lainnya.									
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan melalui pos pengaduan masyarakat di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.	6.1	Presentase ditindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang pengawasan pemerintahan	80%	66.67%	80%	80%	85%	125%	Naik
7	Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Instansi pemerintah Kab. Aceh Jaya dalam rangka memperoleh opini WTP	7.1	Tersedianya laporan hasil inventarisasi temuan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	Sama
		7.2	Presentase Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	25%	36%	25%	83%	74.08%	70.08%	Naik
8	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan Inspektorat Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	8.1	Terlaksananya kegiatan Majelis TPTGR	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	Sama

Dari delapan sasaran dan empat belas indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 hanya 13 indikator yang dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun lalu/tahun 2014. Hal ini disebabkan untuk Tahun 2015 tidak adanya dukungan dana untuk mencapai indikator 4.6.

3. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat dalam tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja s/d tahun 2015	Target Renstra	Tercapai/ Tdk Tercapai
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan peran, fungsi dan kualitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP	1.1	Presentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan	265%	270%	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan	2.1	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	26 ORANG	42 orang	Tidak Tercapai
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang bersih, tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, transparan, bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan serta meningkatkan kualitas pelayanan public dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	3.1	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang di reviu	111 SKPK	116 SKPK	Tidak Tercapai
4	Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu, sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan stake holder (pemangku kepentingan) melalui Aparatur Pengawasan fungsional yang memiliki kemampuan standar audit	4.1	Presentase kenaikan Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu	130%	30%	Tercapai
		4.2	Presentase peningkatan obrik pemeriksaan berkala	76 %	90%	Tidak Tercapai
		4.3	Jumlah proyek yang dievaluasi	24 proyek	41 PROYEK	Tidak Tercapai
		4.4	Jumlah laporan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	3 laporan	3 LAPORAN	Tercapai
		4.5	Jumlah LAKIP SKPK yang dievaluasi	74 LAKIP SKPK	117 LAKIP SKPK	Tidak Tercapai
		4.6	Jumlah SKPK yang menjadi peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	32 SKPK	60 SKPK	Tidak Tercapai

5	Mengoptimalkan potensi Sumber Daya yang ada dan terjalinnya kemitraan dengan aparat pengawas fungsional lainnya.	5.1	Jumlah laporan hasil rapat pemutakhiran data baik tingkat regional maupun nasional	3 LAPORAN	3 LAPORAN	Tercapai
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan melalui pos pengaduan masyarakat di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.	6.1	Presentase ditindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang pengawasan pemerintahan	226.7%	180%	Tercapai
7	Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Instansi pemerintah Kab. Aceh Jaya dalam rangka memperoleh opini WTP	7.1	Tersedianya laporan hasil inventarisasi temuan	3 laporan	3 LAPORAN	Tercapai
7.2		Presentase Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	86%	180%	Tidak Tercapai	
8	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan Inspektorat Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	8.1	Terlaksananya kegiatan Majelis TPTGR	ADA	ADA	Tercapai

Penjelasan masing-masing indikator :

1. Sasaran 1 menetapkan 1 (satu) indikator yang merupakan gambaran kegiatan rutin Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. Sasaran 1 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya yang meliputi kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, Penyediaan Alat Tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Penyediaan Jasa Operasional perkantoran, Pelaksanaan acara ceremonial kedaerahan, Pembangunan Gedung kantor, Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/ berkala gedung, peralatan kantor dan kendaraan dinas.

Untuk Tahun 2015, realisasi capaian kinerja 90% sama dengan capaian kinerja tahun 2014 karena dari semua kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran 1 dapat terealisasi, sedangkan untuk realisasi tahun 2013 realisasi hanya 85% karena ada beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran 1 tidak terlaksana dengan optimal. Dan jika dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2015, maka target sesuai Renstra belum tercapai.

2. Sasaran 2 mempunyai 1 (satu) indikator dan capaian kinerja sebesar 60% yang mempunyai makna Cukup Baik. Hal ini disebabkan efisiensi anggaran perjalanan dinas bimtek/ diklat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015, disebutkan bahwa uang harian untuk bimtek/diklat di kisaran Rp.110.000,- s/d. Rp 170.000 per harinya. Hal ini mengakibatkan keengganan dari pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek.

Adapun diklat ataupun Bimtek yang diikuti oleh Pegawai Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2015 adalah :

1. Bimtek Audit Investigatif yang diselenggarakan di BPKP Perwakilan Aceh (peserta 2 orang)
2. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah diselenggarakan oleh Inspektorat Aceh (peserta 1 orang)
3. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual diselenggarakan oleh Irjen Keuangan Aceh (peserta 1 orang).
4. Diklat TOT tentang Dana Desa diselenggarakan oleh Kementerian Desa Tertinggal (peserta 1 orang)
5. Diklat sertifikasi Penjenjangan Auditor Muda (peserta 1 orang)

Untuk Tahun 2014 dan 2013 realisasi masing- masing 10 orang. Selama 2 tahun berturut-turut Indikator sasaran 2 tercapai 100% karena didukung pendanaan dari pihak luar seperti Inspektorat Aceh dan Irjen beberapa kementerian.

3. Sasaran 3 dicapai dengan 1 (satu) indakator yaitu Jumlah Laporan Keuangan yang direviu. Untuk Tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD sebanyak 39 SKPD, selanjutnya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi tahun 2015 sama dengan realisasi tahun 2014 , sedangkan tahun 2013 hanya bisa melaksanakan reviu terhadap 33 SKPK. Reviu LKPD diperlukan untuk memberikan keyakinan yang terbatas atas LKPD sebelum dilakukan Audit oleh BPK-RI sesuai yang diamanahkan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2008. Reviu belum bisa mencakup semua SKPD dalam lingkungan Kabupaten Aceh Jaya disebabkan kurangnya personil pada Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya yang memahami tehnik reviu LKPD. Dan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2014 memperoleh Opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI. Jika dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2015 dengan target dalam renstra, maka capaian indikator kinerja belum tercapai.

4. Sasaran 4 dicapai dengan beberapa indikator kinerja, yaitu :

a. Presentase peningkatan jumlah PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu

Tahun 2015 presentase kenaikan jumlah PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu sebesar 16 % dari tahun 2014 yaitu 1021 PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2013 yang hanya 630 PNS. Adapun yang menjadi Wajib LP2P adalah semua PNS Golongan III/a ke atas dan minimal berada pada Golongan III/a selama 2 tahun. Dengan keterbatasan SDM yang ada, Panitia LP2P tetap bekerja menyalurkan Undangan Sosialisasi dan Blangko LP2P ke seluruh Instansi (Dinas /Badan /Kantor /Sekretariat/ Kecamatan/Puskesmas/Sekolah) yang ada dalam Kabupaten Aceh Jaya. Selain terkendala jauhnya jarak yang harus ditempuh Panitia, kebanyakan PNS juga belum memahami pengisian blangko LP2P secara akurat, sehingga sosialisasi pengisian LP2P harus selalu dilakukan setiap tahunnya. Disamping itu kendala yang paling utama adalah masih rendahnya pemahaman PNS tentang pentingnya LP2P serta belum adanya sanksi yang tegas dari Pemerintah Daerah tentang Penyusunan dan Penyampaian LP2P, sehingga kesadaran dari Wajib LP2P masih rendah. LP2P yang telah diterima oleh Tim LP2P Kabupaten akan diteruskan kepada Tim LP2P Pusat. Jika dibandingkan realisasi sampai tahun 2015, maka target sesuai Renstra tidak tercapai. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran dari PNS untuk menyampaikan LP2P tepat waktu hal ini ditandai dengan hasil rekapitulasi data yang menunjukkan bahwa yang banyak menyampaikan LP2P adalah guru sedangkan PNS dari SKPK banyak yang tidak menyampaikan LP2P.

b. Presentase Peningkatan Jumlah obrik pemeriksaan berkala

Jumlah obrik tahun 2015 berjumlah 62 obrik yang berarti mengalami kenaikan sebesar 25 % dari Jumlah Obrik pemeriksaan berkala tahun 2014 yaitu 51 obrik atau mengalami kenaikan sebesar 41.6% dari capaian Tahun 2013 yang hanya 36 obrik. Hal ini disebabkan kegiatan pemeriksaan telah dimulai sejak awal tahun. Pemeriksaan reguler merupakan tugas pokok Inspektorat yang paling utama. Kendala utama dalam pencapaian target adalah kurangnya sumber daya manusia di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Jaya. Selain itu sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan belum cukup memadai jika melihat kondisi lapangan yang dituju. Diharapkan dengan melakukan pemeriksaan reguler, pengawasan pembangunan dan keuangan dapat

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2015 maka target Renstra tidak tercapai.

c. Jumlah Proyek yang dievaluasi.

Target untuk tahun 2015 sebanyak 12 proyek yang dapat dievaluasi, realisasinya berhasil melakukan evaluasi sebanyak 6 proyek. Realisasi untuk tahun 2014 sama dengan tahun 2013. Hal ini mengingat keterbatasan personil dan prasarana untuk mendukung pengawasan proyek-proyek yang berada di seluruh Kabupaten Aceh Jaya dan penyebab yang telah disampaikan pada Bab terdahulu.

Adapun proyek yang dievaluasi Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Pembangunan Rumah Dinas Dokter Umum RSUD Teuku Umar (Proyek Dinas Kesehatan).
2. Paket Dayah Risalah Gampong Datar Luas Kecamatan Krueng Sabee (Proyek Dinas Syariat Islam).
3. Paket Lanjutan Pembangunan Pasar di Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee (Proyek Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM)
4. Paket Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan dan Taman RSUD Teuku Umar.
5. Paket Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Sejahtera.
6. Paket Pembangunan Work Shop Pertanian SMK Panga Tahun Anggaran 2015.

d. Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Tersedianya Pelaporan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Kabupaten Aceh Jaya. Hasil Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Konstruksi (Jalan, Jembatan, Gedung dan Irigasi)
Jumlah Paket/ Pekerjaan yang telah diadakan Pelelangan oleh Panitia Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Pemerintah Semester II Tahun 2015 yaitu sebanyak 167 Paket (Jalan, jembatan, tanggul, gedung, saluran/irigasi).
2. Non Konstruksi (Jasa Pemasukan Barang).
Jumlah Paket/ Pekerjaan yang telah diadakan Pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Semester II Tahun 2015 yaitu 19 Paket.

Jika dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2015, maka target Renstra tercapai.

e. Jumlah LAKIP SKPK yang dievaluasi

Untuk Tahun 2015, Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya mempunyai target mengevaluasi 24 LAKIP SKPK dan realisasinya 26 LAKIP SKPD. Capaian tahun 2014 juga 24 LAKIP SKPK yang dievaluasi. Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya belum dapat mengevaluasi semua LAKIP SKPK dalam Kabupaten Aceh Jaya, disamping karena keterbatasan SDM juga karena keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jika dibandingkan realisasi sampai tahun 2015 dengan target Renstra, maka target sudah tercapai.

f. Jumlah SKPK yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

Untuk tahun 2015 indikator ini tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja karena tidak ada kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini. Tahun 2014 sebanyak 32 SKPK yang mengikuti Sosialisasi Penyusunan LAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. Untuk Tahun 2013 indikator ini tidak ada dalam penetapan kinerja tahun 2014.

5. Sasaran 5 mempunyai 1 (satu) indikator yaitu jumlah laporan hasil rapat pemutakhiran data baik tingkat regional maupun nasional. Untuk Tahun 2015 Pemutakhiran data tingkat Provinsi Aceh telah dilaksanakan di Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Laporan pemutakhiran data memuat jumlah temuan BPK- RI dan APIP (BPKP Perwakilan Provinsi Aceh, Inspektorat Aceh, Inspektorat Aceh Jaya) yang sudah ditindaklanjuti, dalam proses tindak lanjut dan belum ditindaklanjuti
6. Pada sasaran 6, indikator presentase ditindaklanjuti pengaduan Masyarakat tentang pengawasan pemerintahan.

Pada tahun 2015, laporan pengaduan dari masyarakat sebanyak 8 pengaduan dan yang bisa ditindaklanjuti 6 pengaduan, yaitu :

1. Pemeriksaan pada MIN Dayah Baro;
2. Pemeriksaan pada RSUD.Teuku Umar Calang
3. Pemeriksaan pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya
4. Pemeriksaan pada Gampong Tuwi Priya Kecamatan Pasie Raya
5. Pemeriksaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya
6. Pemeriksaan pada Sekretariat Kecamatan Panga

Realisasi tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yang hanya terealisasi 66%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2015 adanya pos biaya yang mendukung untuk kegiatan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Sedangkan pada tahun 2014, pos biaya tersebut tidak diakomodir dalam DPA Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. Akan tetapi jika diperbandingkan dengan realisasi sampai tahun 2015, maka target Renstra tercapai.

7. Penjelasan indikator sasaran 7 adalah :

- a. Indikator 1 : tersedianya laporan hasil inventarisasi temuan. Untuk tahun 2015 telah tersedia laporan inventarisasi temuan.
- b. Indikator 2 : presentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti. Target untuk indikator ini adalah 30% dari temuan yang telah diinventarisir dengan periode pemeriksaan Tahun 2006- 2015. Jumlah temuan 170 temuan dengan nilai Rp. 72.861.815.780,03,- rekomendasi sebanyak 415 rekomendasi senilai Rp. 15.719.672.902,80,- Yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 149 senilai Rp. 5.173.310.192,37,- ; belum sesuai rekomendasi sebanyak 152 senilai Rp. 8.764.746.028,41,-; belum ditindaklanjuti sebanyak 114 rekomendasi senilai Rp. 1.781.616.682,02,-

Maka jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebesar 36% dari total rekomendasi.

Dalam proses tindak lanjut, sebuah temuan dikategorikan sudah ditindaklanjuti apabila telah melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan Tim Pemeriksa. Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya hanya memfasilitasi antara Objek pemeriksaan dan Tim Pemeriksa, sehingga Inspektorat kabupaten Aceh Jaya bertekad untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara kontinu semua temuan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi semua SKPK dalam Kabupaten Aceh Jaya setiap bulan.

8. Target capaian Sasaran 8 adalah adanya kegiatan operasional TPKN (Tim Penyelesaian Kerugian Negara) Kabupaten Aceh Jaya. Tahun 2015 merupakan tahun kedua kegiatan operasional TPKN Kabupaten Aceh Jaya terlaksana. Dan telah bersidang sebanyak 4 kali serta Laporan Pemantauan Kerugian pada Kabupaten Aceh Jaya Semester II oleh BPK-RI juga telah diterima pada tanggal 31 Desember 2015. Sekretariat TPKN saat ini berada di kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Gambaran Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel 3.5 dibawah ini

Tabel 3.5
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	Program		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan peran, fungsi dan kualitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP	1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	429.429.280	404.607.897	94.22
		1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	211.150.000	209.812.031	99.37
2	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan	2.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	15.454.600	30.91
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang bersih, tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, transparan, bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan serta meningkatkan kualitas pelayanan public dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	3.1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	94.500.000	79.643.200	84.28
4	Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu, sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan stake holder (pemangku kepentingan) melalui Aparatur Pengawasan fungsional yang memiliki kemampuan standar audit	4.1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	94.500.000	79.643.200	84.28
		4.2	Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	630.500.000	571.580.100	90.66
5	Mengoptimalkan potensi Sumber Daya yang ada dan terjalinnya kemitraan dengan aparat pengawas fungsional lainnya.	5.1	Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	630.500.000	571.580.100	90.66
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan melalui pos pengaduan masyarakat di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.	6.1	Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	630.500.000	571.580.100	90.66
		6.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	94.500.000	79.643.200	84.28
7	Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Instansi pemerintah Kab. Aceh Jaya	7.1	Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	630.500.000	571.580.100	90.66

	dalam rangka memperoleh opini WTP					
8	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan Inspektorat Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	8.1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	630.500.000	571.580.100	90.66

B. Aspek Keuangan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja tidak Langsung	2.988.985.609	2.802.105.710	94
1.	Belanja Pegawai	2.988.985.609	2.802.105.710	94
	Belanja Langsung	1.415.579.280	1.281.097.828	90
1.	Belanja Pegawai	477.954.280	469.050.940	98
2.	Belanja Barang dan Jasa	752.505.000	626.926.888	83
3.	Belanja Modal	185.120.000	185.120.000	100

Uraian lebih rinci mengenai aspek keuangan dapat dilihat pada *Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2015 (Lampiran 2)*



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pedoman Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, LAKIP Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati Aceh Jaya. Dalam melaksanakan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 tersebut terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Perencanaan program hendaknya dilakukan secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat lebih mendukung pada pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawasan melalui diklat, bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat memperperluas wawasan aparat pengawasan.
3. Menginstruksikan kepada setiap Pegawai yang mengikuti Pelatihan agar bertanggungjawab atas pelatihan yang telah diikuti untuk diimplementasikan dalam kegiatan.
4. Menginstruksikan semua Inspektur Pembantu dan Kepala Sub. Bagian agar semua arsip tersimpan dengan baik dan akurat, sehingga akan mempermudah semua pelaporan.
5. Perlunya peningkatan koordinasi antar masing-masing Pejabat Struktural dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga visi dan misi Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya akan tercapai.
6. Membuat sistem pengumpulan data sehingga mempermudah kinerja tim penyusun LAKIP .
7. Melakukan analisa ulang terhadap target indikator kinerja agar dapat tercapai di masa yang akan datang.

Calang, 19 Januari 2016
Inspektur Inspektorat
Kabupaten Aceh Jaya

H.T.RIDWAN, SE
Nip.19560807 198103 1 007

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
INSPEKTORAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

(dalam rupiah)

No. urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	-	-	-
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
1.1.3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dip	-	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-
	Jumlah Pendapatan			
2	BELANJA DAERAH	4.404.564.889	4.083.203.538	321.361.351
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.988.985.609	2.802.105.710	186.879.899
2.1.1	Belanja Pegawai	2.988.985.609	2.802.105.710	186.879.899
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.415.579.280	1.281.097.828	134.481.452
2.2.1	Belanja Pegawai	477.954.280	469.050.940	8.903.340
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	752.505.000	626.926.888	125.578.112
2.2.3	Belanja Modal	185.120.000	185.120.000	-
	Jumlah	4.404.564.889	4.083.203.538	321.361.351
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.404.564.889)	(4.083.203.538)	(321.361.351)

Calang, 31 Desember 2015
 Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya
 Selaku Pengguna Anggaran

H. T. RIDWAN, SE
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19560807 198103 1 007

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat Tahun 2015

**REKAPITULASI JUMLAH WAJIB LP2P
YANG MENGEMBALIKAN BERKAS
TAHUN 2015**

NO.	SKPK	GOLONGAN							JUMLAH	KET
		IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a		
1	SEKRETARIAT DAERAH									
	1 SEKRETARIS DAERAH	1							1	
	2 ASISTEN PEMERINTAHAN								0	BELUM
	1 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN								0	BELUM
	2 BAGIAN HUKUM								0	BELUM
	3 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL								0	BELUM
	3 ASISTEN KEISTIMEWAAN ACEH, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN								0	BELUM
	1 BAGIAN KEISTIMEWAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						1		1	
	3 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN								0	BELUM
	4 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM								0	BELUM
	1 BAGIAN UMUM								0	BELUM
	2 BAGIAN ORGANISASI								0	BELUM
	3 BAGIAN KEPEGAWAIAN								0	BELUM
	5 STAF AHLI								0	BELUM
6	SEKRETARIAT DPRK								0	BELUM
7	DINAS SYARIAT ISLAM	1			1	6	4		12	
8	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA (STRUKTURAL)									
	- STRUKTURAL (DINAS)				1	5			6	
	- FUNGSIONAL (GURU)		26	149	75	204	277	108	839	
9	DINAS KESEHATAN			3	12	12	20	7	54	
10	DINAS PEKERJAAN UMUM				2	7	7	3	19	
11	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN KABUPATEN		1	2	2	8	6	2	21	
12	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			2	5	1	8		16	
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		1	2	2	4	1		10	
14	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN		1	1	4	4	12		22	
15	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM		1	3		3	5		12	
16	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK								0	BELUM
17	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			1	1	2	3		7	
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	1	4	1	1	6	2	16	
19	INSPEKTORAT	1	5	3		2	3	2	16	
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							1	1	
21	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KS		1		5	2	5	1	14	
22	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		2	1	3	7	12	1	26	
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN		1		3	4	4		12	
24	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						2		2	

REALISASI PEMERIKSAAN INTERNAL SECARA BERKALA TAHUN ANGGARAN 2015

INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH JAYA

NO	SKPD/OBRIK	NO/ Tanggal SPT	TANGGAL	JUMLAH HARI
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT KECAMATAN INDRA JAYA	700/025/2015 27 JULI 2015	28 JULI S/D 04 AGUST 2015	6
2	SEKRETARIAT KECAMATAN DARUL HIKMAH	700/026/2015 06 AGUST 2015	10 AGUST S/D 14 AGUST 2015	5
3	SEKRETARIAT KECAMATAN JAYA	700/024/2015 27 JULI 2015	28 JULI S/D 04 AGUST 2015	6
4	SEKRETARIAT KECAMATAN PASIE RAYA	700/027/2015 06 AGUST 2015	10 AGUST S/D 14 AGUST 2015	5
5	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	700/015/2015 19 MEI 2015	20 MEI S/D 03 JUNI 2015	10
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	700/016/2015 19 MEI 2015	20 MEI S/D 28 MEI 2015	12
7	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	700/030/2015 06 AGUST 2015	10 AGUST S/D 26 AGUST 2015	12
8	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	700/023/2015 25 JUNI 2015	29 JUNI S/D 10 JULI 2015	10
9	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	700/029/2015 06 AGUST 2015	10 AGUST S/D 26 AGUST 2015	12
10	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	700/40/2015 11 SEPT 2015	14 SEPT S/D 29 SEPT 2015	10
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	700/028/2015 06 AGUST 2015	10 AGUST S/D 26 AGUST 2015	12
12	DINAS SYARIAT ISLAM	700/018/2015 19 MEI 2015	28 MEI S/D 15 JUNI 2015	12
13	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	700/054/2015 13 NOV 2015	16 NOV S/D 01 DES 2015	12
14	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	700/017/2015 27 MEI 2015	28 MEI S/D 15 JUNI 2015	12
15	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	700/06/2015 27 FEB 2015	2 MARET S/D 11 MARET 2015	8
16	KANTOR PERIZINAN DAN INVESTASI MODAL	700/09/2015 27 FEB 2015	2 MARET S/D 11 MARET 2015	8
17	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	700/10/2015 27 FEB 2015	2 MARET S/D 11 MARET 2015	8
18	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK	700/012/2015 11 MEI 2015	12 MEI S/D 26 MEI 2015	10
19	DINAS KESEHATAN	700/032/2015 04 September 2015	7 SEPT S/D 28 SEPT 2015	15
20	SEKRETARIAT DPRK	700/039/2015 11 September 2015	14 SEPT S/D 28 SEPT 2015	8

21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	700/08/2015 27 FEB 2015	2 MARET S/D 11 MARET 2015	8
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	700/07/2015 27 FEB 2015	2 MARET S/D 11 MARET 2015	8
23	SEKRETARIAT BAITUL MAL	700/013/2015 11 MEI 2015	12 MEI S/D 20 MEI 2015	6
24	BAGIAN HUMAS SETDAKAB ACEH JAYA	700/031/2015 31 AGUST 2015	01 SEPT S/D 07 SEPT 2015	5
25	DINAS PU	700/059/2015 04 DES 2015	07 DES S/D 22 DES 2015	12
26	BAPPEDA	700/061/2015 07 DES 2015	10 DES S/D 21 DES 2015	8
27	SMA NEGERI I DARUL HIKMAH	700/11/2015 20 MARET 2015	23 MARET S/D 6 APRIL 2015	10
28	SMP NEGERI 3 DARUL HIKMAH	700/11/2015 20 MARET 2015	23 MARET S/D 6 APRIL 2015	10
29	SD NEGERI 6 DARUL HIKMAH	700/11/2015 20 MARET 2015	23 MARET S/D 6 APRIL 2015	10
30	SD NEGERI 7 DARUL HIKMAH	700/03/2015 2 FEB 2015	3 FEB S/D 12 FEB 2015	8
31	SMP NEGERI 2 DARUL HIKMAH	700/03/2015 2 FEB 2015	3 FEB S/D 12 FEB 2015	8
32	SD NEGERI 3 PANGA	700/02/2015 2 FEB 2015	3 FEB S/D 12 FEB 2015	8
33	SMP NEGERI 1 PANGA	700/02/2015 2 FEB 2015	3 FEB S/D 12 FEB 2015	8
34	SMP NEGERI I JAYA (Gp. Glee Putoh)	700/05/2015 2 FEB 2015	2 MARET S/D 13 MARET 2015	10
35	SD NEGERI I JAYA (Gp. Pasar Lamno)	700/05/2015 2 FEB 2015	2 MARET S/D 13 MARET 2015	10
36	SD NEGERI 6 JAYA (Gp. Meudheun)	700/05/2015 2 FEB 2015	2 MARET S/D 13 MARET 2015	10
37	SMP NEGERI I KRUENG SABEE	700/04/2015 2 FEB 2015	3 FEB S/D 16 FEB 2015	10
38	SD NEGERI I KRUENG SABEE	700/04/2015 2 FEB 2015	3 FEB S/D 16 FEB 2015	10
39	SD NEGERI 3 KRUENG SABEE	700/04/2015 2 FEB 2015	3 FEB S/D 16 FEB 2015	10
40	SMAN 2 SAMPOINIET	700/20/2015 3 JUNI 2015	4 JUNI S/D 11 JUNI 2015	6
41	SMPN 2 SAMPOINIET	700/20/2015 3 JUNI 2015	4 JUNI S/D 11 JUNI 2015	6
42	SMKN 1 PASIE RAYA	700/19/2015 3 JUNI 2015	4 JUNI S/D 11 JUNI 2015	6

